



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

***COLLABORATIVE LEADERSHIP* DALAM PEMBANGUNAN
DI KELURAHAN PEBATUAN KECAMATAN KULIM KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

**VINA NURHALIZA
1963201035**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
FEBRUARI 2025**



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

***COLLABORATIVE LEADERSHIP* DALAM PEMBANGUNAN
DI KELURAHAN PEBATUAN KECAMATAN KULIM KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Lancang Kuning

VINA NURHALIZA
1963201035

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
FEBRUARI 2025**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Vina Nurhaliza

NIM : 1963201035

Tanda Tangan : 

Tanggal : 27 Februari 2025



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama : Vina Nurhaliza
NIM : 1963201035
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : *Collaborative Leadership* Dalam Pembangunan di Kelurahan Pebatuan
Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru

Pembimbing I

Widia Astuti, S.Sos., M.Si
NIDN. 1009088501

Pembimbing II

Dwi Herlinda, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005038802

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si
NIDN. 1012058804



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp (0761) 52658 Pekanbaru

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : VINA NURHALIZA
No. Mahasiswa : 1963201035
Jurusan : Administrasi Publik
Judul Skripsi : *Collaborative Leadership* dalam Pembangunan di Kelurahan
Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Widia Astuti, S.Sos.,M,Si
Pembimbing : Dwi Herlinda, S.Sos,M,Si
Penguji : Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA
Penguji : Fara Merian Sari, S.Sos.,M,Si

()
()
()
()

Ditetapkan di : Pekanbaru
Tanggal : 26 Februari 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua yakni Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari kegelapan ke zaman yang terang benderang. Sehingga berkat Rahmat dan syafaat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Collaborative Leadership* dalam Pembangunan di Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan serta support dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning, yang selalu memberikan arahan dan masukan yang membangun sehingga penulis termotivasi dan memiliki mimpi yang besar dalam menjalani kehidupan yang lebih baik.
2. Ibu Widia Astuti, S.Sos.M.Si selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukkan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

3. Ibu Dwi Herlinda, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membantu, meluangkan waktu ditengah kesibukkan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang selalu membimbing, menasehati, dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga penulis mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari
5. Bapak Suwandi Nasution beserta Anggota dan Staf Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis dan bersedia memberikan waktu serta data-data yang berguna bagi penulisan skripsi ini.
6. Terimakasih untuk diri sendiri. Karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran dengan sangat baik. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
7. Kedua orang tua yaitu Bapak Ray Hadi dan Ibu Zahari. Terimakasih atas semua perjuangan dan kerja kerasnya dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita.

8. Saudari penulis Kak Zakiah Ayu Rayza, S.Ip, serta seluruh keluarga besar penulis terimakasih selalu percaya pada mimpi-mimpi penulis dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan dan sahabat-sahabat yang selalu ada ,selalu mensupport dan selalu membantu penulis yaitu Eka Yunda Puspita, SE., Shintya Kurnia Saputri, Wahyu Ulil Fathonah, S.A.P.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Pekanbaru, Januari 2025
Penulis

Vina Nurhaliza

ABSTRAK

Nama : Vina Nurhaliza

Program Studi : Administrasi Publik

Judul : *Collaborative Leadership* dalam Pembangunan di Kelurahan
Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Collaborative Leadership* dalam Pembangunan di Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru. *Collaborative Leadership* menjadi pendekatan strategis dalam pembangunan di Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru. Pendekatan ini mengutamakan kerja sama lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Collaborative Leadership* dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Leadership* mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat koordinasi antarpihak, dan mengoptimalkan sumber daya lokal. Namun, tantangan seperti perbedaan kepentingan dan komunikasi perlu dikelola dengan baik untuk memastikan keberhasilan pembangunan.

Kata Kunci : *Collaborative Leadership*, Pembangunan, Kelurahan Pebatuan, Partisipasi Masyarakat, Koordinasi

ABSTRACT

Name : Vina Nurhaliza

Study Program: Public Administration

Title : Collaborative Leadership in Village Development

Pebatuan, Kulim District, Pekanbaru City.

This research aims to find out how Collaborative Leadership works in Development in Pebatuan Village, Kulim District, Pekanbaru City. Collaborative Leadership is a strategic approach in development in Pebatuan Village, Kulim District, Pekanbaru City. This approach prioritizes cross-sector collaboration between government, society and the private sector to achieve sustainable development goals. This research aims to analyze the role of Collaborative Leadership in planning, implementing and evaluating development in Pebatuan Village, Kulim District. The method used is a qualitative approach using interviews, observation and document analysis. The research results show that Collaborative Leadership is able to increase community participation, strengthen coordination between parties, and optimize local resources. However, challenges such as differences in interests and communication need to be managed well to ensure development success.

Keywords: Collaborative Leadership, Development, Pebatuan Village, Community Participation, Coordination

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	20
1.3. Tujuan Penelitian	21
1.4. Kegunaan Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
2.1. Konsep Teoritis.....	22
2.1.1 Organisasi.....	22
2.1.2 Kepemimpinan	22
2.1.3 Kolaboratif	23
2.1.4 <i>Collaborative Leadership</i>	25
2.1.5 Pembangunan	31
2.2. Penelitian Terdahulu	34
2.3. Fokus Penelitian.....	36
2.4. Kerangka Pemikiran.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40

3.1. Lokasi Penelitian.....	40
3.2. Desain Penelitian	40
3.3. Informan Penelitian.....	40
3.4. Jenis Data	40
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	46
4.1. Sejarah Singkat Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru	46
4.2. Gambaran Umum Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru	47
4.3. Visi dan Misi Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru	49
4.4. Keadaan Pegawai Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru berdasarkan Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Usia, dan Jenis Kelamin, ...	49
4.4.1 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	49
4.4.2 Berdasarkan Masa Kerja	50
4.4.3 Berdasarkan Usia	51
4.4.4 Berdasarkan Jenis Kelamin	52
4.5. Uraian Tugas Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru	53
4.6. Struktur Organisasi Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru	63
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
5.1. <i>Collaborative Leadership</i> dalam Pembangunan di Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru.....	64
5.1.1 Visi yang Jelas	66
5.1.2 Inovasi, Kreativitas dan Fleksibilitas	70

5.1.3 Kondusif Kreatif	73
5.1.4 Meningkatkan Transparansi	77
5.1.5 Vertikal dan Horizontal Kolaborasi	81
5.1.6 Kolaborasi	86
5.1.7 Kolaborasi Pihak Eksternal	89
5.1.8 Pengukuran Kinerja	92
5.2. Hambatan Dan Upaya Dalam Mewujudkan <i>Collaborative Leadership</i> dalam Pembangunan di Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru.....	96
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	100
6.1. Kesimpulan	100
6.2. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	106
PEDOMAN WAWANCARA.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Kegiatan atau Program Kerja Kelurahan Pematang Sialang	
Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru	8
Tabel 1.2. Data Anggaran Kelurahan Pematang Sialang Kecamatan Kulim	
Kota Pekanbaru.....	12
Tabel 4.1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	50
Tabel 4.2. Keadaan Pegawai Berdasarkan Masa Kerja.....	51
Tabel 4.3. Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia.....	52
Tabel 4.4. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang mempunyai peranan penting untuk mencapai cita- cita dan tujuan negara. Di dalam pencapaiannya, pemerintah harus menjalankan fungsinya dengan baik dan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan suatu bangsa.

Paradigma pembangunan baru menganggap bahwa pembangunan seharusnya dilakukan atas inisiatif dan dorongan dari masyarakat, jadi masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam seluruh proses pembangunan. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif.

Pembangunan harus adanya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah agar pembangunan berjalan dengan baik dengan komunikasi masyarakat dan pihak pemerintah daerah, dalam proses pembangunan masyarakat khususnya dalam pemberdayaan masyarakat agar dapat terjalinnya komunikasi pemerintah berkewajiban sebagai pemberi pelayanan, pemberdayaan serta dapat memberikan suasana baru kepada masyarakat agar mendapatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Sejak tahun 1999 dikeluarkan berbagai instrument hukum berupa undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP) yang membuka lebar ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan monitoring pembangunan. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum, mendapatkan aspirasi masyarakat, dan sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana.

Perlunya keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena pembangunan yang terlalu menekankan peranan pemerintah birokrasi (bercirikan top down) mendapat kritikan tajam, dimana kurang peka terhadap kebutuhan lokal Korten (1988:87). Dari pada itu, pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka, sehingga mereka berdaya.

Namun jika kita melihat ke belakang, bahwa mulai dari tahap perencanaan pembangunan yang menggunakan pola berjenjang dari bawah ke atas (Bottom-Up) ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa/kelurahan didengar. Begitu pun halnya dalam pelaksanaan proyeknya

yang masih menggunakan sistem tender, di mana tender yang dimaksud melibatkan para kontraktor sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang basisnya tentu berada di desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa, ternyata keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan hanya selesai pada tahap perencanaan yang pada tahap itu pun masih banyak langkah-langkah yang belum terlaksana dengan baik, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritisi mengandung banyak kelemahan.

Misalnya, partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil dari berbagai forum koordinasi di tingkat lebih rendah (desa/ Kelurahan) kadang tidak digubris oleh pemerintah yang lebih tinggi, mekanisme perencanaan mulai dari musrenbang des/kel hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan yang partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama, sehingga masyarakat tidak mendapat kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud.

Dengan adanya kepemimpinan kolaboratif maka mendorong semua pihak untuk terlibat dalam memberikan ide maupun gagasan, sehingga adanya keputusan bersama dalam sebuah organisasi.

Era desentralisasi telah membawa pemerintah daerah menjadi aktor penting dalam penyelenggaraan pemerintah, kewenangan yang diberikan di pundak pemerintah daerah menjadikannya sebagai aktor penting yang akan menentukan nasib dan wajah kemajuan daerahnya. Dinamika perkembangan masyarakat daerah yang dipengaruhi oleh globalisasi, kemajuan teknologi

informasi, perkembangan masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi dan di sisi lain ketidakmampuan birokrasi lokal untuk mengimbangi perkembangan tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah untuk selalu memiliki inisiatif dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakatnya.

Tantangan ini secara otomatis menjadi tantangan bagi tata kepemimpinan lokal untuk selalu berinovasi dalam pengambilan keputusan yang dibatasi oleh aturan normatif dalam rangka membangun kapasitas lokal untuk memacu pembangunan ekonomi lokal, keterbukaan sekaligus akuntabilitas. Namun konsep kepemimpinan dalam konteks *governance* bukanlah konsep kepemimpinan tradisional yang selama ini dikenal.

Lurah sebagai pemimpin di daerah kelurahan agar terciptanya proses pembangunan. Kelurahan dibangun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa Kelurahan adalah wilayah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Kota. Lurah sebagai pemimpin dan pelaksana proses pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Pasal 228 dan 229, diuntut agar bisa membuat masyarakat sejahtera dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah baik dalam pemberdayaan masyarakat untuk bertujuan agar proses pembangunan berjalan sesuai tujuan pembangunan dan kemajuan suatu daerah.

Peraturan Walikota Pekanbaru No. 120 Tahun 2016 Bab V tentang Kelurahan Pasal 14 :

(1) Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah
- b. Sekretaris Lurah
- c. Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban
- d. Seksi Kesejahteraan Sosial
- e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan susunan organisasi kelurahan adalah sebagaimana tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota. Pada Peraturan Walikota Pekanbaru No. 120 Tahun 2016 Bab VI Pasal 15 tentang Tugas dan Fungsi Lurah :

- (1) Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan lainnya;
- (2) Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat.
 - b. Perencanaan Program Kerja pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan.
 - c. Pengoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
 - e. Pelaksanaan upaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum.

- f. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- g. Pengoordinasian lembaga kemasyarakatan.
- h. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lurah merupakan pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Sebagai seorang pemimpin Lurah memiliki banyak peran dalam kepemimpinannya antara lain peran sebagai katalisator, peran sebagai fasilitator, peran sebagai pemecah masalah, peran sebagai komunikator dan untuk semangat kerja pegawai dilihat dari harga diri, tempat yang tepat, kesempatan untuk maju dan fasilitas kerja yang menyenangkan.

Pada Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim ini mempunyai Motto TERPERCAYA yaitu Terdepan dalam Pelayanan-Pelayanan Prima Cepat Akuntabel dan Kerja Nyata. Visi Misi Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim ini Visinya Mewujudkan Pelayanan Prima dan Tata Pemerintahan Yang Profesional, Partisipatif dan Responsif. Sedangkan Misinya Terselenggaranya

pelayanan prima kepada masyarakat yang profesional dengan mendayagunakan seluruh aparatur, mewujudkan pelayanan publik yang prima, cepat, tepat dan efisien, mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan, mewujudkan aparatur yang berkualitas, berbudi luhur, bertaqwa, dan berdaya guna.

Kelurahan Pebatuan mempunyai atau sedang menjalankan beberapa kegiatan/program yaitu:

Tabel 1.1. Data Kegiatan atau Program Kerja Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru

No	Kegiatan/Program	Tahun Pelaksanaan	Aktor	Sumber Pendanaan	Target
1	BSPS (Bantuan Simultan)	2022-2023	-Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) - Lurah - Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	APBN	11 orang
2	Perumahan Layak Huni	2024	-Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) - Lurah - Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	APBN/ Masih Usulan	19 orang
3	Pelatihan Bengkel	2023	Anggota Dewan	APBD	Masyarakat
4	Musrenbang	2023/SetiapTahun	-Lurah -LPM -RT/RW -Masyarakat	APBD	Lingkungan masyarakat
5	LPM	2024	-Lurah -LPM -RT/RW -Masyarakat	APBD	Masyarakat

Sumber: Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim

Pertama, BSPS (Bantuan Simultan Perumahan Swadaya) merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum. Dikutip situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BSPS adalah program dana bantuan renovasi rumah dengan senilai Rp 20 Juta. Nominal tersebut terdiri atas pembelian bahan bangunan senilai Rp 17,5 juta dan upah tukang Rp 2,5 juta.

Dana BSPS ini diberikan secara utuh kepada masyarakat yang berhak menerima tanpa ada potongan sedikitpun. Masyarakat yang berhak menerima bantuan ini diberikan wewenang untuk menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan renovasinya masing-masing.

Tujuan dari Program BSPS ini untuk bertambahnya jumlah penghunian rumah yang layak huni melalui skema BSPS, meningkatnya sistem pelaksanaan program Rumah Swadaya, serta terlaksananya dukungan teknis untuk pengembangan program Rumah Swadaya.

Kedua, program/kegiatan dari Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim adalah Perumahan Layak Huni dari program BSPS maka terwujudkan Perumahan Layak Huni dimana Kementerian PUPR menyatakan, bahwa akan terus mendorong dan menggalakkan pembangunan sejuta Rumah pada tahun 2024. Dimana pemerintah menargetkan akses Rumah Layak Huni mencapai 70 Persen pada Tahun 2024.

Untuk itu Kelurahan Pebatuan dalam program ini masih terdapat usulan/sedang melakukan pendataan untuk Perumahan Layak Huni dimana Target dari Program ini yaitu 19 orang.

Ketiga, Program Pelatihan Bengkel yang diadakan oleh anggota dewan dimana pelatihan tersebut diadakan di Kelurahan Pebatuan untuk masyarakat setempat, anggaran yang dipakai adalah dari anggota dewan tersebut.

Keempat, Program/Kegiatan dari Kelurahan Pebatuan adalah mengadakan Musrenbang yaitu forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Kelurahan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan. Musrenbang diikuti oleh RT, RW, LPM, Jajaran Kelurahan beserta Masyarakat. Dalam kegiatan ini setiap usulan dan masukan dari masyarakat didata dan difilter lagi untuk menjadikan program tersebut prioritas kedepannya. Diantaranya usulan itu adalah pelaksanaan Semenisasi, Drainase, Pengaspalan dan Pelatihan-pelatihan bagi masyarakat.

Dengan adanya Musrenbang diharapkan akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan kelurahan, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar kelurahan. Musrenbang Kelurahan merupakan salah satu wadah dalam menyusun program kelurahan di semua bidang. selain itu musrenbang dilaksanakan untuk menyusun rencana anggaran dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pada saat sebelum terjadinya Covid-19, Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim ada melakukan beberapa pelatihan kepada masyarakat di lingkungan Pebatuan setelah terbentuknya Kelurahan Pebatuan hasil pemekaran dari kelurahan kulim pada tahun 2017. Pada tahun 2018 hingga 2019 kelurahan pebatuan mulai menjalankan program umum pemerintahan dan menjalankan program dalam bentuk pelatihan kepada masyarakat setempat.

Berikut anggaran Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru dalam empat (4) Tahun terakhir:

Tabel 1.2. Data Anggaran Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru

Tahun	Anggaran	Keterangan
2020	10.000.000	Hand Sanitizer (15 RW)
	30.000.000	Masker 3 M (15 RW)
	50.000.000	Sarana Cuci Tangan
	10.000.000	Agenda Sosialisasi dan Administrasi mengenai Covid-19 di Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim
	Total : 100.000.000	Untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19
2021	20.000.000	Hand Sanitizer (15 RW)
	50.000.000	Masker 3 M (15 RW)
	10.000.000	Sarana Cuci Tangan
	20.000.000	Agenda Sosialisasi dan Administrasi mengenai Covid-19 di Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim
	Total : 100.000.000	Untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19
2022	10.000.000	Hand Sanitizer (15 RW)
	50.000.000	Masker 3 M (15 RW)
	20.000.000	Sarana Cuci Tangan
	20.000.000	Agenda Sosialisasi dan Administrasi mengenai Covid-19 di Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim
	Total : 100.000.000	Untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19
2023	10.000.000	Sosialisasi Masyarakat dan kegiatan Musrenbang
	15.000.000	Pembinaan mengenai Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan Produktivitas di Lingkungan Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim
	Total : 25.000.000	Untuk pembinaan masyarakat
2024	10.000.000	Pembangunan Drainase SDN 071
	15.000.000	Semenisasi Jalan kawasan RW 3
	Total: 25.000.000	Untuk Pembangunan di Kawasan Kelurahan Pebatuan

Sumber: Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim

Adagium yang tepat yang mendasari kepemimpinan kolaboratif disampaikan oleh Kozes dan Posner (2007:223) *'leadership is not a solo act, it's a team effort'*. Kepemimpinan bukanlah kegiatan yang dilakukan sendiri tapi merupakan tindakan ataupun upaya kelompok. Tantangan terhadap pemimpin saat ini sangat jauh berbeda dengan keadaan masa lalu, konsep kepemimpinan telah berubah sedemikian cepat bukan hanya untuk organisasi publik, tapi juga menjadi tantangan berat bagi eksistensi organisasi swasta.

Pengetahuan masyarakat semakin meningkat, nilai-nilai sosial mengalami pergeseran, hubungan pimpinan-masyarakat tidak lagi didasari oleh prinsip feodalisme. Dinamika internal dan pengaruh faktor eksternal turut mempengaruhi prinsip-prinsip kepemimpinan di era modern ini. Peran kepemimpinan dalam pemerintahan kolaboratif adalah membantu stakeholder menemukan solusi yang bersifat *win-win*, pemimpin adalah fasilitator atas proses kolaboratif (Chrislip & Larson, 1994; 125).

Kepemimpinan kolaboratif tidaklah diniatkan untuk merancang strategi untuk memecahkan masalah tetapi menciptakan sinergi strategi antar *stakeholders* yang akan menuntun pada solusi yang inovatif. Pada tataran proses inilah kolaboratif *governance* berbeda dengan forum kerjasama lainnya, bukan menyelesaikan tugas semata tetapi mencari cara atau jalan baru dalam memecahkan masalah (Mandell & Keist 2009: 165-166). Pimpinan harus bertindak sebagai katalis maupun fasilitator, membangun saling ketergantungan dan tidak bertindak otoriter.

Kepemimpinan tidak merujuk pada satu individu tertentu tetapi merujuk pada proses bagaimana setiap pihak dapat saling berinteraksi dengan cara-cara yang baru yang saling memanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas masing-masing... *leadership does not refer to one person but rather the process of getting all members to interact in new ways that tap into and leverage from their strengths ...*” (Mandell & Keist, 2009; 165-166).

Fungsi kepemimpinan menjadi isu sentral ketika lingkungan eksternal berubah demikian besar dan tuntutan internal semakin tinggi. Kim (2010,111) menyarankan bahwa kepemimpinan modern haruslah memperhatikan keterkaitan ketergantungan antar komponen, memahami kompleksitas masalah, sekaligus menyadari keterbatasan yang dimiliki yang memaksa konsep kepemimpinan haruslah berubah untuk bisa menghadapi itu semua.

Kepemimpinan tidaklah digambarkan sebagai garis lurus dari atas ke bawah, kepemimpinan modern adalah bagaimana menciptakan cara/media kepada semua pihak untuk berkontribusi untuk mewujudkan sesuatu yang hebat yang diinginkan. *Leadership is ultimately about creating a way for people to contribute to making something extraordinary happen* (Kouzes&Posner, 2007:3).

Menggunakan prinsip kolaborasi dalam tataran pemerintahan tingkat lokal dikatakan menjadi alternatif terbaik ketika pemerintah daerah menghadapi tantangan yang makin kompleks. Di sisi lain tumbuhnya kemitraan antara publik-swasta, semakin pentingnya peran lembaga non pemerintah, tumbuhnya jiwa *voluntir* sukarela di kalangan masyarakat menjadikan proses

kolaborasi dapat tumbuh subur dengan menggunakan kekuatan-kekuatan ini. *Collaborative Leadership* menjadi penting ketika kegiatan yang dilakukan melibatkan hubungan antar pemerintah (lokal-regional-nasional), hubungan antar organisasi, antar sektor dan apabila melibatkan organisasi skala internasional (Kim, 2009).

Ketika para pemimpin berhasil mewujudkan kolaborasi, mereka menciptakan perasaan transparansi yang dibutuhkan di seluruh tim. Transparansi ini menumbuhkan lingkungan keterbukaan, kepercayaan, dan kenyamanan yang, pada gilirannya, memungkinkan para profesional untuk secara bebas berbagi perspektif, suara, opini, dan ide yang berbeda di berbagai sector sebuah langkah penting dalam proses inovasi.

Selain peningkatan inovasi, penelitian menunjukkan bahwa lingkungan seperti ini juga meningkatkan produktivitas di kalangan karyawan. Forbes melaporkan bahwa studi bersama baru-baru ini menemukan bahwa perusahaan yang “mendorong kerja kolaboratif memiliki kemungkinan lima kali lebih besar untuk memiliki kinerja tinggi.”

Secara keseluruhan, organisasi yang dipimpin oleh pemimpin kolaboratif kemungkinan besar akan mengembangkan tim yang lebih tangkas, inovatif, dan berfungsi tinggi sehingga dapat memberikan dampak jangka panjang di seluruh industri.

Saat ini, dunia kerja kini lebih banyak menerapkan model kepemimpinan kolaboratif dibandingkan sebelumnya dan hal ini memiliki alasan yang bagus. Akses terhadap alat kolaborasi digital, perubahan dalam pandangan karyawan

sebagai aset di berbagai bidang fungsional, dan penggunaan data besar dalam pengambilan keputusan telah menyebabkan peningkatan penggunaan tim kolaboratif di berbagai industri. Di bawah ini, kami mengeksplorasi bagaimana masing-masing aspek berkontribusi terhadap peningkatan kolaborasi lintas fungsi.

Keberhasilan bergantung pada penciptaan lingkungan yang penuh kepercayaan, saling menghormati, dan aspirasi bersama di mana semua orang dapat berkontribusi secara penuh dan terbuka untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, para pemimpin harus fokus pada hubungan dan hasil, dan media yang mereka gunakan adalah percakapan berkualitas tinggi.

Bekerja dengan cara ini dapat menjadi tantangan bagi para pemimpin yang telah memiliki rekam jejak keberhasilan dengan menggunakan komando yang tidak memenuhi syarat atas orang-orang dan sumber daya yang berada di bawah kendali mereka. Hanya sedikit pemimpin yang dilatih untuk memimpin secara kolaboratif, terutama di tingkat senior, dan dalam banyak kasus, budaya dan sistem penghargaan dalam organisasi menghambat kolaborasi.

Oleh karena itu, mengembangkan pemimpin yang memiliki kapasitas untuk berkolaborasi dan menciptakan budaya yang selaras adalah hal yang harus dilakukan secara beriringan. Ini merupakan pekerjaan yang sangat menantang, namun semakin penting bagi kesuksesan bisnis.

Maka dengan munculnya paradigma baru yaitu *Collaborative Leadership* (kepemimpinan Kolaboratif) dapat merubah sistem yang lebih baik, sehingga anggota pemerintahan atau masyarakat merasa diikut sertakan dalam pengambilan keputusan.

Konsep *collaborative leadership* diangkat dalam pembangunan di kelurahan karena pembangunan yang efektif di tingkat lokal membutuhkan kerja sama antara berbagai pihak dengan latar belakang, kepentingan, dan sumber daya yang berbeda. Di tingkat kelurahan, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk warga, aparat kelurahan, tokoh masyarakat, organisasi lokal, hingga sektor swasta.

Kelurahan di Indonesia umumnya tidak memiliki anggaran langsung untuk pembangunan fisik karena statusnya sebagai unit administrasi pemerintahan yang berada di bawah kecamatan. Fungsi utama kelurahan lebih fokus pada pelayanan administrasi publik dan koordinasi program pemerintah di tingkat lokal, bukan sebagai pelaksana utama pembangunan.

Ada beberapa alasan utama mengapa kelurahan tidak memiliki anggaran pembangunan langsung:

1. Struktur Pemerintahan yang Terdesentralisasi

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, alokasi anggaran pembangunan dikelola oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) dan kecamatan. Kelurahan hanya melaksanakan program yang diturunkan dari tingkat atas sesuai arahan dan kebijakan pemerintah daerah.

2. Fokus pada Fungsi Administratif

Tugas utama kelurahan adalah memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat, seperti pembuatan KTP, surat pengantar, dan administrasi kependudukan. Fungsi ini berbeda dengan desa, yang memiliki kewenangan otonom dalam mengelola anggaran pembangunan dari dana desa.

3. Tidak Memiliki Otonomi Keuangan

Berbeda dengan desa yang memiliki dana desa dari APBN, kelurahan tidak memiliki otonomi fiskal. Semua kebutuhan operasional kelurahan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh pemerintah kota atau kabupaten.

4. Pembangunan Dikoordinasikan di Tingkat Kecamatan atau Kota

Pembangunan fisik di wilayah kelurahan biasanya dianggarkan oleh kecamatan atau dinas terkait di tingkat kota/kabupaten. Kelurahan hanya berperan dalam mengusulkan program melalui mekanisme seperti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

5. Prioritas Pembangunan Ditentukan oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan skala prioritas pembangunan. Usulan dari kelurahan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Meskipun tidak memiliki anggaran langsung, kelurahan tetap bisa berperan dalam pembangunan melalui beberapa cara:

- Mengusulkan program melalui Musrenbang.
- Membangun kolaborasi dengan pihak swasta, LSM, atau komunitas lokal.
- Menggerakkan partisipasi warga dalam kegiatan swadaya, seperti gotong royong.
- Mengawasi pelaksanaan program pembangunan yang sudah disetujui pemerintah daerah.

Dengan peran tersebut, kelurahan tetap menjadi penghubung penting antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berbasis kebutuhan lokal.

Collaborative leadership penting dalam pembangunan di kelurahan karena mendorong partisipasi, memperkuat rasa tanggung jawab bersama, dan menciptakan solusi yang berkelanjutan. Dengan cara ini, pembangunan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat.

Dari penjelasan diatas bahwa *Collaborative Leadership* merupakan pola pikir kepemimpinan yang melibatkan orang banyak dan menggabungkan ratio, emosi dan semangat dalam proses pembangunan yang di kolaborasi dengan beberapa pihak pemerintahan, swasta dan perguruan tinggi.

Dimana di Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru

1. Dalam proses pembangunan hanya mengandalkan program umum saja, contohnya: BSPS, Perumahan Layak Huni, Musrenbang
2. Tidak berkolaborasi dengan pihak swasta maupun perguruan tinggi
3. Juga program kerja di kelurahan pebatuan kecamatan kulim kota pekanbaru dari tahun 2017 hasil pemekaran kelurahan kulim mengandalkan program kerja umum pemerintahan akan tetapi pada tahun 2018-2019 kelurahan pebatuan ada program pelatihan kepada masyarakat hingga terjadinya *covid-19* yang mengakibatkan dalam menjalankan program kerja maupun inovasi dari kelurahan pebatuan terhambat karena dilarang adanya perkumpulan di masyarakat.

Oleh karena itu penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul “*Collaborative Leadership* dalam Pembangunan Di Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas yang telah dijelaskan, maka sebagai rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kepemimpinan kolaboratif (*collaborative leadership*) dalam Pembangunan di Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor – faktor penghambat kepemimpinan kolaboratif (*collaborative leadership*) dalam Pembangunan di Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kepemimpinan kolaboratif (*collaborative leadership*) dalam Pembangunan di Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan / kendala-kendala bagi kepemimpinan kolaboratif (*collaborative leadership*) dalam Pembangunan di Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, sebagai bahan pertimbangan serta referensi untuk peneliti yang tertarik meneliti permasalahan yang sama.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dan masukan kepada pihak Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulik Kota Pekanbaru.
3. Secara Akademis, sebagai menambah khazanah keilmuan dan menambah literature kepustakaan mengingat kajian ini jarang dilakukan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap *Collaborative Leadership* dalam Pembangunan di Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru, peneliti paparkan beberapa kesimpulan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian Collaborative Leadership dalam Pembangunan di Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru bahwasanya
 - Dalam pembangunan di Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru hanya mengandalkan program umum pemerintahan, belum ada berkolaborasi dengan swasta dan perguruan tinggi.
 - Program Kerja Kelurahan dari tahun ke tahun sesuai program yang telah ditentukan oleh pemerintahan tingkat atas
 - Belum adanya inovasi pembangunan di Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim, masyarakat mengurus segala surat menyurat secara manual/datang langsung ke Kelurahan
2. Faktor hambatan Collaborative Leadership dalam Pembangunan di Kelurahan Pebatuan Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru sebagai berikut :
 - Kurangnya Sinergi antar pihak
Pemerintah, masyarakat, dan organisasi lokal belum memiliki visi atau tujuan yang sama, sehingga kerja sama menjadi sulit terwujud.
 - Minimnya Partisipasi Masyarakat
Tidak semua masyarakat terlibat aktif dalam proses pembangunan karena

kurangnya kesadaran atau kepercayaan terhadap pemimpin lokal. Ketimpangan sosial dan ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat tidak merasa terwakilkan.

- Keterbatasan sumber daya

Anggaran yang terbatas untuk pembangunan, kurangnya tenaga ahli atau sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis.

- Komunikasi yang kurang efektif

Proses komunikasi antara pemimpin kelurahan, pemerintah, dan masyarakat sering kali kurang transparan. Informasi pembangunan tidak tersampaikan dengan baik, sehingga terjadi kesalahpahaman.

- Resistensi terhadap perubahan

Adanya pihak-pihak yang enggan berubah atau sulit menerima gagasan baru, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

- Perbedaan kepentingan

Masing-masing pihak memiliki prioritas atau kepentingan berbeda yang dapat memicu konflik.

6.2 Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Penguatan Visi dan Tujuan Bersama

Adakan musyawarah rutin untuk merumuskan visi pembangunan yang inklusif dan disepakati oleh semua pihak. Libatkan seluruh pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan hingga implementasi.

2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Buat program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui forum diskusi atau survei.

3. Optimalisasi Sumber Daya

Maksimalkan penggunaan anggaran pemerintah dengan perencanaan yang matang dan transparan. Jalin kemitraan strategis dengan perguruan tinggi atau lembaga sosial untuk mendukung sumber daya manusia dan teknologi.

4. Penguatan Komunikasi Antar Pihak

Terapkan komunikasi dua arah yang transparan dan teratur antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Manfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan informasi pembangunan dan menerima umpan balik dari masyarakat.

5. Peningkatan Kapasitas Pemimpin Lokal

Berikan pelatihan kepada pemimpin kelurahan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola kolaborasi. Fokus pada pengembangan keterampilan mediasi, pengambilan keputusan, dan manajemen konflik.

6. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Partisipasi

Libatkan masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Gunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki program pembangunan di masa depan.

7. Mediasi Konflik dan Penyelesaian Masalah

Libatkan tokoh masyarakat atau pihak netral untuk menyelesaikan konflik yang mungkin muncul selama proses pembangunan. Pastikan semua pihak merasa didengar dan kepentingannya diakomodasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Aulia Putri (2021) Kepemimpinan Kolaboratif Wali Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Penanggulangan Wabah Covid-19. Masters thesis, Andalas University.
- Corey,M. (2021) What is collaborative leadership?. Diakses pada 02 Januari 2024, dari <https://blog.jostle.me/blog/what-is-collaborative-leadership>
- Ella Wargadinata. 2016. Kepemimpinan Kolaboratif. Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah Vol.8 No.1
- Gamal,T. (2022, 15 April). Kolaborasi: Pengertian, Indikator & Cara Meningkatkannya. Diakses pada 15 Oktober 2023, dari <https://serupa.id/kolaborasi-pengertian-indikator-cara-meningkatkannya/>
- Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 h.11
- Isnawati dkk. Efektivitas Gaya Kepemimpinan Kolaboratif. Jurnal PubBis 5, no. 1(2021): 14.
- Kim soonhee, 2009, Management strategy for local government to strengthen transparency in local governance, Seoul, United Nations Project office on Governance
- Lai, Emily R. (2011). *Collaboration: A Literature Review*. New York: Pearson.
- O’Leary Rosemary, David M Van Slyke ed Sohne Kim, 2010, The Future of Public Administration around te world, Washinton DC; Georgetown University Press.
- Shayna,J. (2019, 16 Oktober). Collaborative Leadership: What It Is & Why It’s

Important. Diakses pada 14 Desember 2023, dari
<https://graduate.northeastern.edu/resources/collaborative-leadership/>

Wargadinata, E. (2016). Kepemimpinan Kolaboratif. Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah. 8(1) , 1-14.